

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian (pengawasan) keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang (Supriyono, 1990). Menurut Mulyadi (1997), karakteristik anggaran yang baik adalah anggaran yang disusun berdasarkan program. Program-program dalam anggaran tersebut nantinya menghasilkan tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan strategik. Salah satu penganggaran yang sedang berkembang di Indonesia adalah penganggaran dengan sistem aplikasi berbasis web yaitu *e-budgeting*.

E-budgeting merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Sistem *e-budgeting* memberikan peranan yang penting dalam pembuatan anggaran. Sistem tersebut mampu mempersingkat waktu yang diperlukan dalam proses pembuatan anggaran karena dilakukan secara online dan dapat di akses dimana saja. (ebudgeting.surabaya.go.id diakses 20 November 2018). Selain itu *e-budgeting* adalah sistem yang dikembangkan untuk merencanakan anggaran daerah dengan tujuan memberikan panduan penyusunan APBD dan juga perubahannya. Sistem ini meliputi penyusunan RKA, DPA, RKA perubahan, dan DPA perubahan (ebudgeting.jatengprov.go.id diakses 4 Desember 2018). *E-budgeting* sebagai bagian dari konsep e-government kemudian dipandang sebagai mekanisme positif yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan pemberdayaan dari warga negara (Kauvar, 1998).

E-budgeting perlu diterapkan di Indonesia karena mempunyai tujuan yang baik dalam proses penganggarannya. Tujuan dari *e-budgeting* mampu digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan, merinci jenis sumber dan jenis penggunaan dana sehingga mempermudah pengawasan, merasionalkan sumber penggunaan dana, menyempurnakan rencana yang disusun dalam penganggaran, dan menampung serta menganalisa setiap usulan

yang berkaitan dengan keuangan (Nafarin, 2000). Selain itu *e-budgeting* ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan memperbaiki kinerja pemerintah desa khususnya di dalam tata kelola keuangan. Hal ini sesuai dengan pengertian inovasi menurut (Sumarto, 2009) yang menyebutkan bahwa inovasi adalah upaya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru yang pada umumnya terdiri dari beberapa hal seperti misalnya ide baru, metode baru, pendekatan baru dan berbagai upaya untuk mencari solusi kreatif guna meningkatkan partisipasi dan memperbaiki kinerja pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 memperkuat dasar hukum dari *e-budgeting* yang mewujudkan inovasi dengan pertanggungjawaban keuangan yang baik dan benar dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sekaligus perwujudan dari akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *e-budgeting* sebagai sebuah inovasi baru didalam tata kelola keuangan pemerintah (desa), dapat dikatakan sudah berhasil dilihat dari pengoprasian sistem yang dilakukan oleh aparatur dengan baik dan menguasai (Kurnia, Ratih 2017). Penelitian lainnya mengatakan bahwa penerapan *e-budgeting* dapat berhasil dilakukan dengan proses pembinaan meliputi dua tahap yaitu perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa itu sendiri (Nolis, Cia 2016). *E-budgeting* yang diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan anggaran serta menertibkan administrasi dalam proses penganggaran (Nur, Ratih 2016).

Hyung Ji (2008) mengatakan, dalam proses penganggaran lokal partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal perencanaan dan evaluasi. *"According to the meta-analysis on performance budgeting theory and practice, the relationship between citizens' role and performance-based budgeting is an important. Intended to understand the role of citizens to use performance budgeting, particularly for strategic planning and performance evaluation"*. Hasil penelitian tersebut sangat sesuai dengan salah satu konsep dari sistem *e-budgeting* yaitu pengawasan evaluasi penganggaran dilakukan juga oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi melihat dan memantau proses pengelolaan anggaran.

Meski sudah ada studi tentang pembuatan sistem *e-budgeting* dan penerapannya, perlu juga di buat penelitian pembuatan sistem *e-budgeting* dan penerapan di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, karena di daerah tersebut belum menerapkan sistem *e-budgeting*. Selain itu sistem penganggaran

yang dipakai dari skala kabupaten belum menerapkan sistem *e-budgeting*. Melihat fenomena yang terjadi tentang keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terjadi setiap tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun 5 anggaran 2018.

Selain permasalahan yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat dari segi pengelolaan anggaran, perlunya mengoptimalkan hasil dari pendapatan asli daerah dan transparansi dari hasil PAD tersebut. Pendapatan tersebut berupa hasil usaha, dan hasil aset yang dimiliki kecamatan sebagai salah satu pendapatan asli untuk bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kecamatan. Sering kali di kecamatan pendapatan dari hasil usaha dan hasil aset tidak jelas aliran dana yang diperoleh sehingga menjadi permasalahan dari segi transparansi. Penerapan transparansi di skala desa juga dalam penganggaran menggunakan sistem yang dibuat oleh kemendagri yaitu siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Siskeudes ini mempunyai kelemahan yaitu proses pengelolaan anggaran dirasa belum sebaik sistem *e-budgeting* yang sudah diterapkan di berbagai daerah dalam urusan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa ([Radarminggu.com/Pengelolaan dana desa di Grobogan](http://Radarminggu.com/Pengelolaan_dana_desa_di_Grobogan) diakses pada 27 November 2018)

Dengan menggunakan sistem *e-budgeting*, mendukung pemerintah dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja. Karena dalam konsep penganggaran berbasis kinerja ini memiliki prinsip dan tujuan meliputi alokasi anggaran yang nantinya disusun dalam dokumen rencana kerja dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan sumber daya yang efisien. Selain itu, fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. *Money Follow Function* juga merupakan prinsip dari penganggaran berbasis kinerja yang menggambarkan pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit

kerja sesuai maksud pendiriannya. (Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, 2009)

Untuk alasan-alasan tersebut, penelitian ini dilakukan karena dirasa sistem *e-budgeting* perlu dibuat dan menarik untuk pengembangan desa di Desa Galanggang untuk menciptakan penganggaran yang bersifat akuntabilitas dan transparan juga menciptakan suatu inovasi. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Batujajar. Nantinya hasil dari penelitian ini dapat membantu proses penganggaran yang berbasis aplikasi serta dapat diakses secara online yang memudahkan dalam penganggaran terutama mengelola dana di kecamatan.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dalam pengelolaan anggaran khususnya untuk pengelolaan dana di kecamatan dan di desa sering terjadi celah-celah untuk terjadinya penyelewengan dana. Selain itu, pemanfaatan dana terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak terbentuk transparansi mengenai penggunaan dana. Pendapatan asli daerah yang didapat dari hasil usaha dan hasil aset tidak jelas dalam proses transparansi aliran dana. Hal tersebut dikhawatirkan akan terjadi praktek-praktek korupsi di tingkat kecamatan maupun desa. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan utama, yaitu **“bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya celah-celah korupsi pengelolaan dana, serta mendukung kemajuan dalam pengelolaan dana di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?”**.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat perancangan (alur) sistem *e-budgetin* untuk meminimalisir terjadinya celah-celah korupsi di Kecamatan Batujajar yang sekaligus dapat mendukung kemajuan kecamatan dari segi pengelolaan penganggaran untuk pembangunan.

1.3.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. mengefisienkan dan mengefektifkan anggaran dana dalam bentuk penyusunan anggaran yang transparan, tepat waktu, tepat program, tepat kegiatan, dan tepat rekening;

2. sistem informasi *e-budgeting* yang di bangun dapat mempermudah dalam proses pengelolaan penganggaran; dan
3. mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang dimiliki guna meningkatkan penghasilan dari kecamatan dan desa.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Studi

Batasan mengenai pembahasan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. sistem yang dibangun merupakan sistem informasi *e-budgeting* untuk pengelolaan anggaran keuangan dana menggunakan pemrograman PHP dan *database* MySQL;
2. sistem yang dibangun mengikuti alur proses penganggaran dana berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Struktur Pengelolaan Keuangan Desa; dan
3. sistem yang dibangun berupa rancangan sistem *e-budgeting* dalam bentuk aplikasi berbasis web.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah

Kecamatan Batujajar terdiri dari 7 desa, yaitu; Desa Selacau, Desa Batujajar Barat, Desa Batujajar Timur, Desa Giriasih, Desa Galanggang, Desa Pangauban, dan Desa Cangkorah. Luas Kecamatan Batujajar secara keseluruhan adalah 32,04 km². Desa terluas di Kecamatan Batujajar adalah Desa Batujajar Barat dan desa yang memiliki luas terkecil adalah Desa Cangkorah. Untuk batas administrasi dari Kecamatan Batujajar dapat dilihat pada gambar 1.1.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada sub-bab ini akan menguraikan mengenai sistematika pembahasan mengenai kegiatan penelitian, yakni:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup wilayah baik secara makro dan mikro serta sistematika pembahasan dari kegiatan penelitian ini.

BAB 2 KERANGKA TEORI

Bab ini akan membahas mengenai kerangka teori dan *State Of The Art* kajian studi kegiatan penelitian ini.

BAB 3 KERANGKA BERPIKIR DAN METODOLOGI

Pada bab ini akan membahas mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini, serta metodologi yang digunakan yaitu metode pendekatan, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB 4 GAMBARAN UMUM WILAYAH

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum wilayah studi dari penelitian ini.

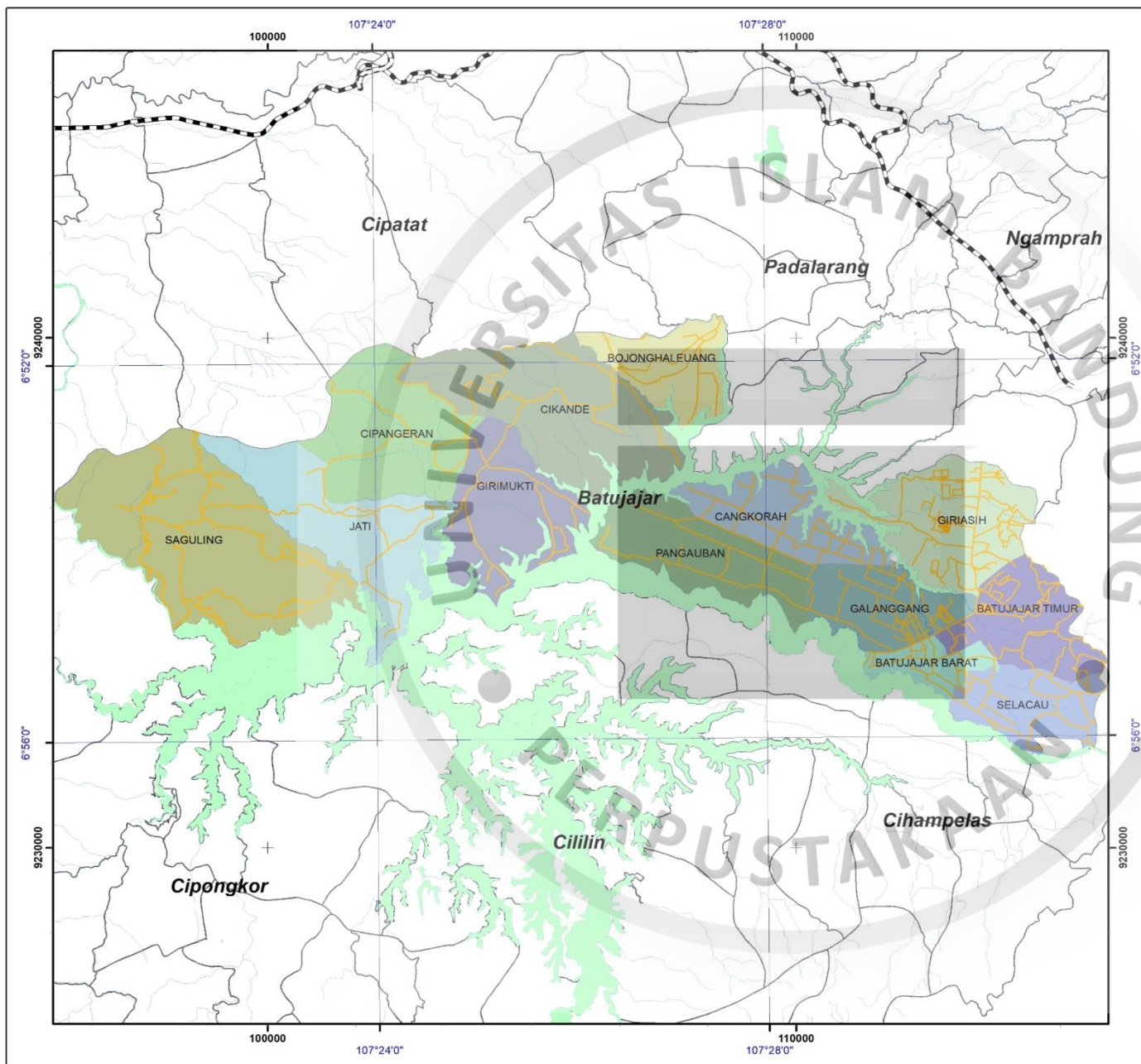
BAB 5 ANALISIS DAN PERANCANGAN


Pada bab ini akan membahas mengenai analisis-analisis yang digunakan dalam penelitian ini dan perancangan pada penelitian.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian ini.



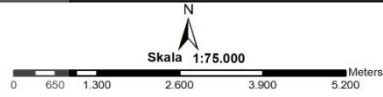




UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA


PROPOSAL TUGAS AKHIR
RANCANGAN SISTEM E-BUDGETING DI DESA GALANGGANG
KECAMATAN BATUJAJAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Gambar : PETA ADMINISTRASI KECAMATAN BATUJAJAR



Skala 1:75.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 48 S



Legenda

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Desa

Jaringan Transportasi

- Jaringan Jalan
- Jalan Kereta Api

Perairan Darat

- Sungai
- Waduk

Nama Desa

- BATUJAJAR BARAT
- BATUJAJAR TIMUR
- BOJONGHALEUANG
- CANGKORAH
- CIKANDE
- CIPANGERAN
- GALANGGANG
- GIRIASIH
- GIRIMUKTI
- JATI
- PANGAUBAN
- SAGULING
- SELCAU

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
- Sumber data citra Satelit dari Google Earth perekaman Tahun 2018

KETERANGAN :
- Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-batas administrasi